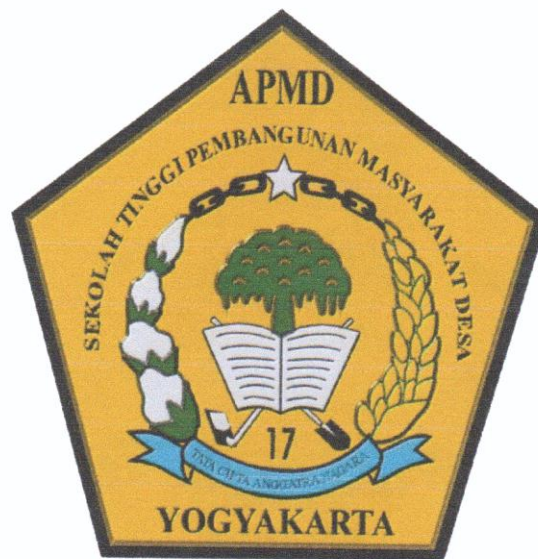


**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN
BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

FRANSISKA EMY TAFRE

08521930

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2017



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN
BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Jenjang Pendidikan Strata (1)**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA**

2017



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN
DIDEPAN TIM PENGUJI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

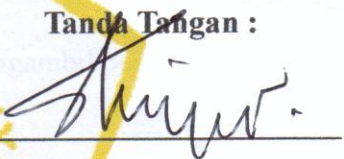
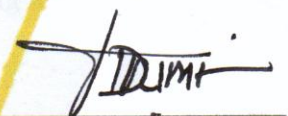
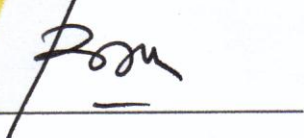
Pada Hari : JUM'AT

Tanggal : 15 April 2017

Waktu : 10.00 Wib

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD" Yogyakarta

Nama : **TIM PENGUJI** Tanda Tangan :

1. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si
Ketua Penguji/ Pembimbing 
2. Dra. Tri Daya Rini, M.Si
Penguji Samping I 
3. Ir. Muhammad Barori, M.Si
Punguji Samping II 

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
YOGYAKARTA

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2017

MOTTO

“Bersama yesus saya lebih dari seorang pemenang, iya mampu merubah kutuk menjadi berkat amin”

“takut akan Tuhan adalah pergumulan pengetahuan, tetapi orang bodoh ,menghina hikmat dan didikan (amsal 1:7)”.

“berdoalah untuk apa yang anda kerjakan, Bekerjalah untuk apa yang anda doakan”

“Kesalahan adalah suatu alamia yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun, kamu harus mampu menghadapinya hingga akhir perjuanganmu”.

“Belajar tidak selalu dari buku, lingkungan juga bisa membuat kita mengambil pelajaran”

“Formulasi dari sebuah kesuksesan adalah 3: bedoa, kerja keras dan pantang menyerah”

“Kesalahan akan membuat seseorang belajar untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang”

“Jangan menyerah dan teruslah mencoba! Tuhan akan melihat usaha dan kerja kerasmu”

“Jangan terlalu gantung pada orang lain faktanya, kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan, hanya saja kamu tak pernah mempercayainya”.

“Tuhan memberikan kita MATA bukan untuk menghina, tapi untuk melihat situasi, MULUT bukan untuk mengkritik, tapi untuk menyampaikan kebenaran, TANGAN bukan untuk menghukum yang berdoasa, tapi untuk menawarkan bantuan, TELINGA bukan untuk dengar gosip, tapi untuk mendengar keluh kesah.
GUNAKAN SESUAI DENGAN KEHENDAK TUHAN”.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, dimana telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, adapun skripsi ini di persembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang Tua ku yang Cintai dan ku kasihi Bapa R. TAFRE dan Mama P. Anggiluly yang dengan sepenuh hati membesarkan dan mendidik ku hingga tak mungkin ku membalasnya.
- ❖ Buat keluarga besar Tafre, Anggiluly, Waromi dan Fonataba yang sudah membantuku dalam perkuliahan hingga selesai.
- ❖ Almamaterku, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
- ❖ Organisasi Kedaerahan ku BAMANA (Barisan Mahasiswa Kaimana).
- ❖ Terimakasih ku buat ketiga saudara/i ku tersayang, Ade Febriana M. Tafre, Ade Joshua A. Tafre, dan Onco Rosalinda H. Tafre. Yang telah memberikan kasih,cinta dan sayang yang tulus, Semoga selalu dalam lindungan TYME
- ❖ Terimakasih buat teman-teman asrama Dupiat PKMFP fak-fak yang telah memberikan dukungan dan motifasi
- ❖ Terimakasih buat teman-teman seangkatan yang telah membantuku dalam perkuliahan ini hingga selesai.
- ❖ Terimakasih buat kak mussa, teman ku sessil, teman ku eko n adiku indra yang telah membantu ku dalam proses penyusunan skripsi ini.
- ❖ Buat kekasih hati ku “Lut Amin.Fenetiruma” dan Buah Hatiku sayang yang telah menjadi malaikat pelindung ku di surga “M. Billal Ivanovich’ yang setia menemani dan menungguku, serta memberikan kasih sayang dan perhatian semoga tuhan selalu melindungi dan memberkati hubungan kita, “ I Love You”
- ❖ Peluk sayang buat kucing kesayangan ku “mace sweg” yang selalu setia menemani setiap proses revisi skripsi ini.
- ❖ Terimakasih juga buat kota Yogyakarta dan masyarakat jogja yang mana telah menerimaku untuk menempuh studiku disini dan yang telah mengajariku tentang tata krama, kesopanan dan kesabaran, “jogja selalu dihati, jogja istimewa”.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala kesempatan hidup yang telah Dia berikan, sehingga dengan restunya pula skripsi dengan judul : **“Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Banguntapan, Kecamatan banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”**. dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan yang harus di penuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Habib Mushin S.Sos M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD”APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si sebagai pembimbing skripsi.
4. Seluruh Dosen Program Studi S-1 Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua, saudara serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi serta semangat yang tiada henti dalam setiap usahaku.
6. Teman-teman angkatan 2008, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam

penyusunan skripsi ini.

7. Pihak-pihak yang membantu menyediakan fasilitas-fasilitas sehingga dapat memperlancar dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna maka segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 4 Oktober 2017

Penulis

FRANSISKA EMY TAFRE

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
SINOPSIS	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	6
1. Partisipasi Masyarakat	6
2. Desa	13
3. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	15
E. Ruang Lingkup Penelitian	27
F. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Unit Analisis	29

3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Teknik Analisi Data	31

BAB 11 PROFIL DESA BANGUNTAPAN

A. Keadaan Geografis	33
1. Letak dan Luas Wilayah	33
2. Batas Wilayah	33
3. Wilayah Desa	33
B. Keadaan Demografi	34
1. Jumlah Penduduk	34
2. Komposisi Penduduk Menurut Umur	35
3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	37
4. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	38
C. Keadaan Ekonomi Dan Sosial Budaya	39
1. Sarana dan Prasarana	39
2. Deskripsi Potensi	41
D. Keadaan Pemerintahan	42
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Desa	42
2. Struktur organisasi	43
3. Tugas dan Fungsi Desa	44
4. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Banguntapan	48
5. Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD)	50
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	52
7. Rukun warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)	54

8. APBDesa Tahun 2017	55
-----------------------------	----

BAB 111 ANALISIS

A. Deskripsi Informan	56
1. Identitas Informan Menurut umur	56
2. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin	57
3. Identitas Informan Menurut Tingkat Pendidikan	57
4. Identitas Informan menurut Pekerjaan/Jabatan	58
B. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	59
1. Keikutsertaan Masyarakat dalam Perencanaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa)	60
2. Keikutsertaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	67
3. Keikutsertaan Masyarakat dalam evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
II. 1. Komposisi Penduduk menurut umur	35
II. 2. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	37
II. 3. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	38
II. 4. Sarana Pendidikan	39
II. 5. Sarana Kesehatan.....	39
II. 6. Sarana Ibadah	40
II. 7. Sarana Umum	41
III. 1. Identitas Informan Menurut Umur	56
III. 2. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin	57
III. 3. Identitas Informan Menurut Tingkat Pendidikan	58
III. 4. Identitas Informan Menurut Jabatan/Pekerjaan	59

INTISARI

Penelitian ini berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi APBDesa Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan latar belakang masalah adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi APBDesa. Adapun kondisi empirik di Desa Banguntapan, dalam hal ini pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memang masih terjebak dalam formalisme, artinya pemerintah desa hanya mengisi pos-pos anggaran yang diberikan oleh Pemkab Bantul tanpa melakukan proses pembuatan APBDesa yang aspiratif dan partisipatif. Disamping itu kemampuan SDM yang masih sangat terbatas, sehingga proses pembuatan APBDesa kadang jauh melenceng dari tujuan APBDesa itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi APBDesa dan mengetahui kendala-kendala dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi APBDesa.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana lokasi penelitiannya Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY. Dengan informan diantaranya, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Warga Masyarakat, dan Anggota BPD. Teknik analisis data diperoleh dengan teknik yang mengacu pada pada pengumpulan data, dengan pengamatan (observasi), dokumentasi dan wawancara (interview) dengan para informen yang dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan tiga aspek (1). Keikutsertaan Masyarakat dalam Perencanaan APBDesa belum efektif, dimana masyarakat masih memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah desa untuk mengurus segala kebutuhan desa. Kearifan masyarakat dalam forum juga masih sangat rendah, (2). Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa belum efektif dimana Pemerintah Desa cenderung diskriminasi dalam melibatkan masyarakat, masyarakat hanya diberi kesempatan dalam kegiatan yang bersifat pekerja fisik. Pemerintah Desa juga sangat tertutup tentang APBDesa sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah APBDesa yang diterima dan digunakan untuk apa. Bahkan masyarakat tidak mengetahui apa itu APBDesa. (3). Keikutsertaan masyarakat dalam evaluasi APBDesa belum efektif, usulan-usulan masyarakat belum sesuai dengan program pembangunan yang sesuai dengan alur perencanaan APBDesa, karena alasan keterbatasan dana dan penyesuaian program pembangunan dari pemerintah pusat dan provinsi. Masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi APBDesa sehingga masyarakat tidak tau berhasil atau tidaknya program pembangunan serta penyebab tidak berhasilnya

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah Indonesia. Jauh sebelum bangsa ini terbentuk entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi instusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan instansi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengatur kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar. (Purwo Santoso, agustus 2003)

Kondisi Desa yang demikian menunjukkan hakekat desa sebagai instusi kemasyarakatan, ini merupakan warisan turun-temurun dalam masyarakat. Desa dengan demikian ditandai dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk melakukan pengelolaan konflik dan pengembangan kemasyalatan sebagai jati diri Desa. Desa didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum ataupun entitas sosial polotik yang bukan hanya berhak namun juga mampu mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingannya sendiri.(Eko Sutoro, 2005).

Dalam sosok yang demikian., Desa relatif independen dan tidak banyak dibebani oleh kepentingan negara. Lebih dari itu, tata kelembagaan internal Desa berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang berbeda bukan hanya penyebutannya melainkan juga struktur internalnya.

Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa merupakan peletakan dasar bagi pembaharuan Desa. Upaya pembaharuan merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat Desa agar dapat memiliki akses terhadap berbagai hal yang mempengaruhi hidup mereka. Pembaharuan Desa menurut (Sutoro Eko, 2005) merupakan hal yang mesti dilakukan karena Desa

telah kehilangan jati dirinya. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya berhenti dikabupaten atau kota melainkan harus dibawah sampai ke Desa sebagai solusi untuk pembangunan kemandirian desa.

Dalam bingkai desentralisasi dan otonomi daerah, berbagai ruang publik telah di buka bagi masyarakat Desa untuk berpartisipasi Desa diberi kesempatan untuk merencanakan dan menentukan apa yang menjadi kebutuhannya. Pendekatan bottom-up dipakai untuk menggantikan pendekatan top-down. Prinsip Subsidiaritas dipakai sebagai dasar pengembangan partisipasi masyarakat desa. Prinsip ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan di level yang lebih rendah tidak perlu melibatkan level yang lebih tinggi. (Sutoro Eko, 2005). Dalam konteks ini kita dapat mengatakan bahwa apa yang dapat di putuskan dan dilakukan di tingkat Desa tidak perlu diintervensi oleh pemerintah di atasnya. Dalam hal ini Desa dibiarkan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri secara lebih otonom.

Prinsip subsidiaritas ini mengasumsi suatu kenyataan bahwa masyarakat Desa lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional yang telah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Pembangunan tidak hanya merupakan program yang diturunkan dari pemerintah melainkan program yang direncanakan secara partisipatif dimana masyarakat terlibat didalamnya.

Seluruh upaya pembaharuan itu mendesak agar masyarakat diberi ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan. Rakyat bukan lagi objek melainkan mesti ditempatkan sebagai subjek dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. Upaya pembaharuan ini merupakan upaya untuk menegakkan demokrasi Di Indonesia, dimana ruang publik di buka bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam hubungan dengan perencanaan dan pembagnuan di Desa, Desa tidak lagi hanya menjadi

objek berbagai proyek dari pemerintah di atasnya melainkan Desa diberi peluang untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 5 tentang Desa, menyiratkan bahwa Desa perlu menyusun sendiri rencana pembangunan jangka menengahnya (RPJMDes) yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif (menyeluruh/lengkap) selama 5 tahun. RPJMDes merupakan dokumen tertulis yang berfungsi sebagai panduan bagi Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa bersama warga masyarakat untuk meraih masa depan. RPJMDes tersebut disusun secara partisipatif melalui mekanisme musyawarah pembangunan Desa (musrenbangdes). Dan RPJMDes tersebut kemudian dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan program kerja tahunan Desa. Dari RKP-Desa tersebut, setiap kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan Desa akan dimasukkan kedalam APBDDesa. Dari mekanisme tersebut diperlukan partisipasi masyarakat agar dalam setiap penentuan kebijakan selalu berdasarkan pada kebutuhan masyarakat Desa.

Dengan berlakukunya otonomi daerah, dan sesuai dengan Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, maka peran serta Pemerintah Desa sangat diharapkan untuk menunjang dan meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk biaya pembangunan diberbagai bidang.

Dengan kata lain bahwa Otonomi Daerah memberikan keleluasaan Desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk bagaimana suatu Desa melakukan perencanaan pembangunan di Desanya masing-masing. Perencanaan pembangunan yang partisipatif merupakan salah satu pola pendekatan perencanaan pembangunan yang kini sedang dikembangkan.

Dalam Undang-undang Otonomi Daerah ini juga daerah memberi peluang kepada Desa dalam hal ini Pemerintah Desa untuk mengatur pula rumah tangganya atau pemerintahannya sendiri dengan adanya Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang salah satu ayatnya

membahas alokasi anggaran dana desa yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa secara bijaksana dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan di Desa dengan memakai anggaran alokasi dana desa sebagai bagian APBDesa.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya, bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan sehingga nuansa yang di kembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah. Adapun partisipasi mengkehendaki adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Desa. Partisipasi merupakan keterlibatan setiap warga negara dalam mengambil keputusan

Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak lagi ditentukan secara sepihak oleh pemerintah Desa, tetapi dirumuskan pula oleh masyarakat. Agar terciptanya *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Menurut UNDP (Sutoro Eko, 2005: 17-18) mengidentifikasi *Good Governace* yaitu : 1. Partisipatif 2. Transparan dan tanggung jawab 3. Efektif dan berkeadilan 4. Mempromosikan supremasi hukum 5. Memastikan bahwa prioritas sosial,ekonomi, dan politik di dasarkan pada konsensus dalam masyarakat 6. Memastikan bahwa suara penduduk miskin dan rentah didengarkan dalam proses pembuat keputusan .

Dalam setiap penentuan kebijakan pemimpin Desa dalam hal ini Kepala Desa harus selalu menekankan prinsip-prinsip Good Governance, begitu pula dalam pengelolaan keuangan desa, adapun prinsip pengeloalan keuangan desa dalam rangka Good Governance harus mencakup beberapa aspek diantaranya adalah :

- a. Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan Desa Pemerintah Desa dan BPD harus mendengar aspirasi dari masyarakat.
- b. Partisipatif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah Desa harus

melibatkan masyarakat.

- c. Transparansi, masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBDesa, termasuk program pembangunan, lelang kas desa, bantuan pemerintah dan pungutan ke masyarakat.
- d. Akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan kepada aturan yang berlaku. (Sutoro Eko 2005)

Dalam proses pengelolaan APBDesa dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 harus menekankan pada prinsip Good Governance, baik dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, sampai kepada Evaluasi. Sehingga APBDesa tidak terjebak dalam fenomena proseduralisme yang menyebabkan APBDesa belangsung secara tidak bermakna, karena tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat dan rencana startegis Desa, melainkan hanya sebagai prosedur yang harus di lewati.

Dalam peraturan menteri ini yang di maksud dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dan di tetapkan oleh peraturan Desa.

Penulis tertarik mengambil Daerah Penelitian Di Desa Banguntapan karena Desa Banguntapan merupakan Pedesaan yang memiliki masyarakat majemuk, baik dari sisi sosial, politik maupun Ekonomi, dan berusaha untuk menfokuskan perhatian pada Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi APBDesa.

Adapun kondisi empirik Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, dalam hal Pengelolaan APBDesa memang masih terjebak pada Formalisme, artinya pemerintah desa hanya mengisi pos-pos anggaran yang di berikan oleh Pemkab Bantul tanpa melakukan proses pembuatan APBDesa yang Aspiratif dan Partisipatif. Disamping itu, kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada masih sangat terbatas, sehingga proses pembuatan APBDesa kadang jauh melenceng dari tujuan APBDesa itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Dr. Lexy. J. Moleong, M.A.1993. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- [https ://www.jogloabang.com/Pustaka/Permendagri-113-tahun-2014-Pengelolaan-Kuangan-Desa](https://www.jogloabang.com/Pustaka/Permendagri-113-tahun-2014-Pengelolaan-Kuangan-Desa). Diunduh pada hari kamis 21 September 2017 13:50.
- Institute Rresearch and Empowerment (IRE) yogyakarta, 2003. “*Desa : situs baru demokarasi lokal*”
- Iryo Jimy, 2008, “ *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa*” Program Studi Ilmu Pemerintahan Yogyakarta. (Skripsi tidak dipublikasikan)
- Janwarin Linda, 2006, “ *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Program studi ilmu pemerintahan Yogyakarta. (Skripsi tidak dipublikasikan)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, Balai Pustaka.
- Laporan Kelompok Praktikum, 2014, “*Efektifitas ADD Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa*”. Studi Khusus Desa Gebongan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara.
- Muhibudin Nur Hafid, 2007, “ *Partisipasi Desa dalam Pembuatan Perda Tentang Desa Sesuai Prinsip Demokrasi*” Program Studi Ilmu Pemerintahan Yogyakarta. (Skripsi tidak dipublikasikan).
- Nuhuyanan Faisal Ahmad, 2012, “ *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Labetawi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual Propinsi Maluku*”. Program Studi Ilmu Pemerintahan Yogyakarta.(Skripsi tidak dipublikasikan)
- Purwo Santoso, agustus 2003, “*Pembaharuan Desa secara Partisipatif*”, Yogyakarta
- Sutoro Eko, 2003, “*Pembaharuan masyarakat Desa*” Yogyakarta.
- Sutoro Eko, 2005, “*Manifesto Pembaharuan Desa*” : persembahan 40 Tahun STPMD”APMD”. Yogyakarta APMD Perss
- Sutoro Eko, 2005, “*Pembaharuan Otonomi Daerah*” Program Studi Ilmu Pemerintahan Yogyakarta.
- Suharsimi, 2007, “*Evaluasi Program Pendidikan*”, Jakarta, Bumi Aksara

Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabbar, 2004, "*Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*". Jakarta, Bumi Aksara

Santoso Ali, 2010, "*Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dan Pembangunan Jalan Kota*". Program Studi Ilmu Pemerintahan Yogyakarta. (Skripsi tidak dipublikasikan)

Saufa, 2016, "*himpunan Lengkap Undang-Undang Desa*" Balai Pustaka Indonesia.
(Undang-undang Tentang Desa No.6 Tahun 2014)

Siagian. H. Drs, 1986, "*Administrasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Sumber-sumber Pendapatan Desa*". Yudhistira

Surianigrat Bayu, 1985, "*Pemerintahan Administrasu Desa dan Kelurahan*". Aksara Baru Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No, 25 Tahun 2004, "*Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*"